

PERANAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI NARA SUMBER DAN MEDIA MONITORING PADA PELAKSANAAN PPK AKSELERASI PENINGKATAN IPM JAWA BARAT 2001-2010

Erwin Harahap*

Abstrak.

Pada tahun 2001 hingga 2004, Propinsi Jawa Barat memperoleh score IPM berturut-turut, 66,10; 67,45; 67,87 dan 68,36. Nilai-nilai IPM tersebut masih berada dibawah target perolehan IPM Propinsi Jawa Barat 2001-2010. Oleh karena itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan IPM dengan meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi (PPK) akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat menuju IPM 80 pada tahun 2010. Perguruan tinggi sebagai lembaga independen, dapat berperan serta aktif untuk mendukung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai sebagai nara sumber, staf ahli, lembaga konsultasi, atau peran lainnya dalam ikut serta mensukseskan program-program pemerintah, terutama dalam program peningkatan IPM. Perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai lembaga independen dalam monitoring dan evaluasi baik kinerja maupun penggunaan dana PPK, sehingga dapat mewujudkan efisiensi pendanaan, serta usaha yang optimal dalam mencapai target IPM 80 Propinsi Jawa Barat pada tahun 2010.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM Program pendanaan Kompetisi (PKK)

1 Latar Belakang

1.1 Indeks Pembangunan Manusia : Indonesia dan Jawa Barat

Pada salah satu terbitan surat kabar *on-line* disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tetap buruk selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2004 Indonesia menempati urutan ke-111 dari 175 negara ditambah wilayah khusus Hongkong dan wilayah pendudukan Palestina yang diteliti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Program-UNDP). Posisi tersebut tidak jauh

* **Erwin Harahap, S.Si**, adalah Dosen Tetap Fakultas MIPA Unisba

berbeda dari laporan UNDP tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-112.

Dalam laporan UNDP tahun 2004, Indonesia menempati posisi dibawah negara-negara miskin seperti Kirgistan (110), Equatorial Guinea (109) dan Algeria (108). Data yang termuat dalam situs <http://www.undp.org/hdr2004> terasa menyakitkan jika posisi Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya.

Singapura (25), Brunai Darussalam (33) Malaysia (58), Thailand (76), sedangkan Filipina (83). Indonesia hanya satu tingkat diatas Vietnam (112) dan lebih baik dari Kamboja (130), Myanmar (132) dan Laos (135).

Dalam laporan UNDP yang diberi tajuk *Kebebasan Budaya dalam Dunia yang Beragam*, Norwegia (1) menempati urutan teratas disusul Swedia (2), Australia (3), Kanada (4), Belanda (5), Belgia (6), Islandia (7), dan Amerika Serikat (8).

Satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 10 besar negara yang mempunyai indeks pembangunan manusia di atas negara-negara lainnya adalah Jepang (9). Kondisi negeri Sakura tersebut jauh lebih baik daripada Irlandia, Swiss dan Inggris.

Propinsi Jawa Barat menargetkan IPM 80 pada tahun 2010. Ini merupakan rencana strategis Propinsi Jawa Barat yang dituangkan pada program akselerasi IPM 80 Propinsi Jawa Barat tahun 2001-2010. Jawa Barat telah menargetkan perolehan IPM setiap tahunnya, diantaranya Jawa Barat menargetkan IPM pada tahun 2003 dan 2004 sebesar 72,3 dan 73,5, namun realisasi yang dapat dicapai hanya sebesar 67,87 dan 68,36 saja. Salah satu indeks penyumbang tidak tercapainya target IPM adalah indeks daya beli yang hanya mencapai 58,63 dan 58,83 dari seharusnya 64,3 dan 67,0.

Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat pada tahun 2005 meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi (PPK) untuk akselerasi peningkatan IPM Propinsi Jawa Barat, dimana target IPM 80 harus bisa tercapai pada tahun 2010.

1.2 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut PBB adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, *Peranan Perguruan Tinggi Sebagai Nara Sumber Dan Media Monitoring Pada Pelaksanaan PPK Akselerasi Peningkatan Ipm Jawa Barat 2001-2010 (Erwin Harahap)*

harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya pada negara-negara di seluruh dunia. Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh ekonom Pakistan **Mahbub ul Haq**, dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP pada laporan tahunannya.

Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni: (1) Usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup; (2) Pendidikan, yang diukur dengan dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga; (3) Standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang Dollar AS. Setiap tahun, diterbitkan daftar negara anggota PBB yang menurut peringkat nilai IPM.

1.3 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan pelaksanaan program pendanaan kompetisi (PPK) yang akan terus digulirkan hingga tahun 2010, dan tidak menutup kemungkinan akan terus digulirkan untuk tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat untuk tercapainya target kesejahteraan masyarakat Propinsi Jawa Barat, khususnya pencapaian target IPM 80 pada tahun 2010.

PPK tidak akan berhasil mencapai target, jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah kota atau kabupaten saja, tetapi perlu dukungan dan bantuan berbagai pihak diluar pemerintah, diantaranya adalah peranan dan dukungan staf ahli dari Perguruan Tinggi.

Saat ini belum terlihat bentuk nyata peran Perguruan Tinggi (khususnya UNISBA) dalam meningkatkan IPM Propinsi Jawa Barat melalui PPK, padahal peluang, ruang gerak serta medan garapan yang sangat luas dan kompleks, menuntut Perguruan Tinggi untuk ikut andil dalam usaha peningkatan IPM Jawa barat melalui PPK, baik sebagai nara sumber, staf ahli, lembaga konsultasi, atau dapat juga sebagai media monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK demi tercapainya target IPM 80 tahun 2010.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan masukan dan sumbang saran untuk pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam

usaha pelaksanaan PPK akselerasi peningkatan IPM Propinsi Jawa Barat, dimana, pada pelaksanaan PPK oleh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, sebaiknya dilibatkan Perguruan Tinggi sebagai nara sumber, staf ahli, atau lembaga konsultasi demi tercapainya target IPM 80 tahun 2010. Disamping itu, Perguruan Tinggi juga dapat berperan sebagai media monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK yang didanai pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar 380 milyar rupiah untuk periode tahun 2006-2007, sehingga dana yang cukup besar tersebut tidak sia-sia dipergunakan, dan memberikan sumbangan yang sangat besar untuk pencapaian target IPM tersebut

Manfaat penulisan makalah ini adalah diharapkan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam program peningkatan IPM Propinsi Jawa Barat, terutama pada pelaksanaan PPK. Selain itu, makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi, terutama bagi civitas akademika Universitas Islam Bandung -dimana penulis saat ini beraktifitas-, sebagai sarana pembuka wawasan, bahwa, pemanfaatan ilmu yang kita miliki sangat diperlukan dan sangat ditunggu peran aplikasinya oleh masyarakat luas. Selain itu diharapkan Perguruan Tinggi dapat lebih memaksimalkan pemikirannya untuk menemukan program terbaik untuk diterapkan di dalam masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup, kecerdasan masyarakat yang tinggi serta kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

Seiring dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidik, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat, dan diharapkan dapat ikut serta mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2 Dasar Program Pendanaan Kompetisi (PPK)

Penetapan target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada tahun 2010 sebagai salah satu indikator makro keberhasilan pencapaian Visi Jawa Barat, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pembangunan sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan faktor utama dan tujuan hakiki dari pembangunan.

Misi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut, dari sisi Pemerintah Daerah akan ditempuh melalui pelaksanaan fungsi pelayanan

yang berorientasi pada terciptanya keadilan, fungsi pemberdayaan yang berorientasi pada pembentukan kemandirian dan fungsi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan tersebut hanya dapat dijalankan dan dicapai jika dalam organisasi pemerintah sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien dan inovatif.

Kesetiaan pada misi tersebut mengharuskan kepemimpinan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat mengembangkan organisasi dan tata kerja yang memberi keleluasaan kepada setiap pemimpin unit kerja pada berbagai tingkatan, untuk menggunakan sebaik-baik metode yang mereka kembangkan sendiri. Oleh sebab itu kompetisi dan desentralisasi merupakan dua strategi kebijakan yang sangat krusial dalam menjamin kesuksesan misi pencapaian IPM 80 tahun 2010.

2.1 Program Pendanaan Kompetisi 2006 : Akselerasi Peningkatan IPM Propinsi Jawa Barat

Pemerintah Propinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dengan target IPM 80 di tahun 2010. Akselerasi tersebut sangat diperlukan karena Pemerintah Propinsi Jawa Barat menyadari pentingnya untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia.

Perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pencapaian IPM 80 juga sangat logis karena penguatan perekonomian Jawa Barat harus dibuktikan melalui kesejahteraan masyarakat daerahnya. Perhatian ini menjadi semakin besar ketika melihat kecenderungan historis yang menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi daerah dalam merealisasikan pencapaian IPM. Untuk itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat berupaya memaksimalkan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja semua sektor layanan publik sehingga berkinerja optimal serta meningkatkan kerjasama dan partisipasi nyata dari masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat, untuk keberhasilan pencapaian IPM 80 di tahun 2010.

Dalam menjalankan misi akselerasi pencapaian IPM 80 di tahun 2010, Pemerintah Propinsi Jawa Barat meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi (PPK Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat selanjutnya disingkat dengan "PPK") yang fokus pada kompetisi kinerja kabupaten/kota

didalam menggalang sinergi dengan pemerintah propinsi, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat. Peluncuran PPK ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target IPM dengan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi.

Melalui pendanaan PPK, pemerintah propinsi berkehendak untuk secara sinergis bersama pemerintah daerah mengatasi masalah rendahnya IPM. Untuk mengatasi rendahnya IPM dengan memanfaatkan dana PPK, maka kabupaten/kota harus mendisain program yang mempunyai dampak meningkatkan IPM 80. Sifat dari program PPK adalah berkelanjutan dan didisain melalui proses evaluasi diri dengan melihat: kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang mempengaruhi kabupaten/kota untuk maju dan berkembang.

PPK diluncurkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan target IPM 80 di tahun 2010 secara bertahap, melalui peningkatan Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks Daya beli (IDB). Tujuan lain PPK adalah menumbuhkan budaya penerapan pola pendanaan dengan misi tertentu (*mission budget*) -- dalam hal ini akselerasi pencapaian IPM 80 -- yang bersifat kompetitif (*competitive grant*).

Di awal pelaksanaan PPK, diharapkan setiap kabupaten/kota pengusul mampu melakukan evaluasi diri sebagai dasar untuk menyusun program "pengobatan" terhadap masalah rendahnya IPM yang dihadapi secara sistematis, dengan ditunjang oleh studi kelayakan. Selain dokumen evaluasi diri dan studi kelayakan program, PPK pada jangka pendek diharapkan dapat pula berkontribusi langsung pada peningkatan IPM 80. PPK diharapkan dapat membina kerjasama antar SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) untuk memenuhi tuntutan memecahkan masalah secara komprehensif. PPK sekaligus diharapkan dapat menggairahkan semangat kabupaten/kota serta SKPD untuk berkompetisi secara sehat dengan menunjukkan keunggulan kinerjanya.

2.2 Pengajuan Proposal PPK

Proposal diajukan oleh kabupaten/kota dengan Sekretaris Daerah (sekda) sebagai Ketua Satlak (satuan pelaksana) Kabupaten/Kota dalam lingkup Pemerintah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan tahapan seleksi. Setiap kabupaten/kota hanya boleh mengajukan 1 (satu) proposal yang

merupakan konsolidasi dari berbagai program akselerasi IPM. Proposal dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib bekerja sama dengan masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan setempat. Proposal harus disahkan oleh Bupati/Walikota.

2.3 Struktur Organisasi Pelaksana PPK

Tim pelaksana PPK di tingkat kabupaten/kota adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, diketuai oleh Sekda Kabupaten/Kota yang pada tugas sehari-harinya dibantu oleh Ketua Harian.

Ketua Harian Satlak Kabupaten/Kota adalah PNS yang bertugas di kantor Kabupaten/Kota, ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Satlak Kabupaten/Kota membawahi sejumlah personel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas kinerja Satlak. Personel yang ditugaskan sebagai bagian dari Satlak perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini.

PPK adalah program pemberdayaan personel Pemda, oleh karena itu diwajibkan memanfaatkan sebanyak mungkin PNS yang bertugas di Pemerintah Kabupaten/Kota, pemanfaatan profesional dari luar lebih pada upaya pendampingan agar para pelaksana dapat mempunyai kinerja dan kompetensi yang lebih baik selama PPK berlangsung dan setelah PPK selesai.

2.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPK

Dalam melaksanakan program-program PPK, satlak dimonitor oleh tim monitoring dan evaluasi (tim monev) yang berkedudukan di bawah Bupati/Walikota. Tim Monev Kabupaten/Kota adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Ketua dan Sekretaris Tim Monev Kabupaten/Kota adalah PNS yang bertugas di kantor Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Tim tersebut membawahi sejumlah personel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas kinerja Tim Monev. Personel yang bertugas perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini.

Tim Monev Kabupaten/Kota berfungsi untuk:

1. Menjamin kesuksesan pelaksanaan PPK oleh Satlak kabupaten/kota melalui proses monitoring dan evaluasi seawal mungkin.
2. Sebagai internal auditor yang melakukan proses monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perancangan program dan pelaksanaan program di awal, di tengah, dan di akhir program. Dengan mekanisme ini diharapkan pelaksanaan PPK selalu berada pada koridor yang benar dalam mencapai target-targetnya.

Tim Monev Kabupaten/Kota tidak berfungsi sebagai eksternal auditor yang berbasis pada temuan di akhir kerja Satlak.

3 Target dan Realisasi IPM JABAR 2001 - 2010

Pemerintah propinsi Jawa Barat meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi (PPK) akselerasi IPM Jawa Barat 2001-2010, dimana target IPM JABAR pada tahun 2010 diharapkan mencapai score 80. Sebuah gambaran masyarakat yang cukup sejahtera, dimana tingkat kesehatan dan kualitas hidup sangat baik, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai, serta kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi.

Target maksimal dan harapan yang tinggi adalah sesuatu hal yang baik. Dengan demikian, maka diharapkan dapat lebih memacu semangat untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan dan dicita-citakan.

Tetapi seringkali kita lupa, bahwa menggantungkan sesuatu kepada target atau harapan saja, tidak cukup. Perlu lebih dari sekedar kerja keras untuk mencapai IPM 80 pada tahun 2010, dimana jalan menuju target IPM 80 merupakan jalan terjal dan berliku, penuh ancaman dan tantangan yang siap menghadang. Langkah awal persiapan pekerjaan besar ini adalah dengan menganalisis target IPM serta realisasi yang telah dicapai, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi IPM Jawa Barat 2001 – 2010

		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
IPM	T	68.35	70.89	72.37	73.53	74.5	75.60	76.60	77.70	78.90	80.00
	R	66.10	67.45	67.87	68.36						
IP	T	76.90	79.2	80.20	81.20	82.0	82.8	83.6	84.3	85.1	85.9
	R	64.80	78.30	78.40	79.02						
IK	T	66.53	68.0	68.60	69.20	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	70.7
	R	66.33	66.55	66.57	67.23						
IDB	T	55.00	65.6	68.20	70.20	72.3	74.2	76.3	78.7	81.1	83.6
	R	55.10	57.42	58.63	58.83						

Ket : T=Target; R=Realisasi; IPM=Indeks Pembangunan Manusia; IP=Indeks Pendidikan;

Berdasarkan data yang ada, maka terlihat bahwa trend rata-rata peningkatan realisasi IPM keseluruhan (hingga tahun 2004) adalah sebesar 1,129 %. Trend peningkatan ini lebih rendah dan terpaut resultansi yang cukup jauh apabila dibandingkan rata-rata peningkatan target IPM 2001-2010 yaitu sebesar 1,767 %. Dari sini dapat disusun kemungkinan pencapaian realisasi IPM pada tahun 2010, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Apabila kita bertahan dengan cara peningkatan IPM seperti pada tahun-tahun sebelumnya, mungkin juga termasuk tahun ini, maka diperkirakan dicapai score IPM hanya sebesar 73,123 (Tabel A) pada tahun 2010 dengan kenaikan IPM rata-rata tiap tahun sebesar **1,129 %**. Kondisi ini berada cukup jauh dibawah target yang diharapkan. Untuk mencapai target yang diharapkan, maka diperlukan usaha ekstrim, yakni peningkatan rata-rata IPM sebesar **2,656 %** (tabel B) mulai tahun 2005 berturut-turut untuk tahun berikutnya hingga tahun 2010. Dengan cara demikian, maka *insya Allah* akan dicapai IPM sebesar 80 pada tahun 2010. Tentu saja usaha semacam ini memerlukan kerja yang *sangat* keras, pemikiran yang *sangat* maksimal, serta do'a yang tidak pernah putus.

Tabel 3.2 Analisis Perolehan IPM tahun 2010 berdasarkan kondisi yang ada

TABEL A		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
IPM	T	68.35	70.89	72.37	73.53	74.5	75.60	76.60	77.70	78.90	80.00
	R	66.10	67.45	67.87	68.36	69.13	69.91	70.7	71.5	72.31	73.123

Ket : T = Target; R = Realisasi

↑
Angka kemungkinan IPM dengan peningkatan rata-rata 1.129%

TABEL B		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
IPM	T	68.35	70.89	72.37	73.53	74.5	75.60	76.60	77.70	78.90	80.00
	R	66.10	67.45	67.87	68.36	70.18	72.04	73.95	75.92	77.93	80.003

Ket : T = Target; R = Realisasi

↑
Angka kemungkinan IPM dengan peningkatan rata-rata 2.656%

Penulis yakin, walaupun dengan dana yang terbatas, tetapi apabila disertai dengan **kesungguhan** dan **kejujuran**, maka target IPM 80 akan tercapai. Oleh karena itu, peran Perguruan Tinggi, terutama dalam hal dukungan nara sumber, staf ahli, media monitoring dan evaluasi, dan lain-lain, sangat diperlukan demi mensukseskan target realisasi IPM 80 pada tahun 2010.

Peningkatan angka IPM dibagi dalam tiga bagian, yaitu peningkatan IP (indeks pendidikan), peningkatan IK (indeks kesehatan) dan IDB (indeks daya beli). Ketiga bagian ini merupakan komponen-komponen penilaian IPM, karena itu ketiganya harus memiliki peningkatan yang relevan dan seimbang.

3.2 Peningkatan IPM bidang Pendidikan

Terdapat dua hal yang dijadikan indikator peningkatan IPM bidang pendidikan atau IP (indeks pendidikan). Pertama adalah jumlah rata-rata lama pendidikan (memiliki score indeks 1/3), yang kedua adalah banyaknya

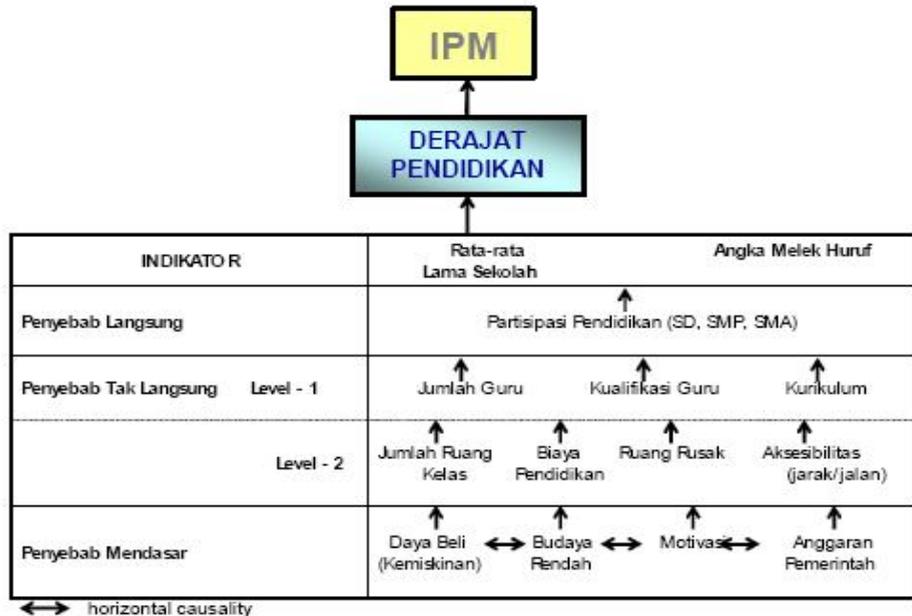
orang dewasa yang bisa membaca diukur dengan jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (memiliki score indeks 2/3). Semakin besar jumlah rata-rata lama pendidikan (dalam tahun), dan semakin besar jumlah rata-rata orang dewasa yang bisa membaca, maka semakin tinggi pula score IP dan meningkatkan IPM. Sebaliknya, rendahnya jumlah rata-rata lama pendidikan, dan banyaknya orang dewasa yang bisa membaca, akan mengakibatkan rendahnya score IP.

Peningkatan IPM bidang pendidikan dapat dilaksanakan melalui program baru atau peningkatan berbagai aktifitas yang telah dilakukan. Peningkatan ini dilakukan berdasarkan kepada temuan-temuan dilapangan. Temuan-temuan inilah yang akan mewujudkan akar permasalahan sehingga akan lebih memudahkan penyusunan aktifitas untuk peningkatan indeks pendidikan (IP) yang akan berakibat pada peningkatan IPM.

Gambar/bagan 3.3. menguraikan tentang analisis akar permasalahan pendidikan. Gambar/bagan 3.3 ini dapat dijadikan acuan untuk menyusun evaluasi diri mengenai akar permasalahan pendidikan.

Pemerintah kota/kabupaten sebagai pelaksana PPK dapat bersama-sama dengan Perguruan Tinggi setempat menganalisis akar permasalahan pendidikan, diantaranya penyebab mendasar, penyebab tak langsung, juga penyebab langsung yang mengakibatkan rendahnya IP (indeks pendidikan), yang juga berakibat rendahnya IPM. Ketiga penyebab ini akan menghasilkan data rata-rata lama sekolah dan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (melek huruf). Dari sini dapat disusun program-program untuk meningkatkan IP berdasarkan pada peningkatan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kemampuan membaca orang dewasa.

Gambar 3.3 Analisis akar permasalahan pendidikan



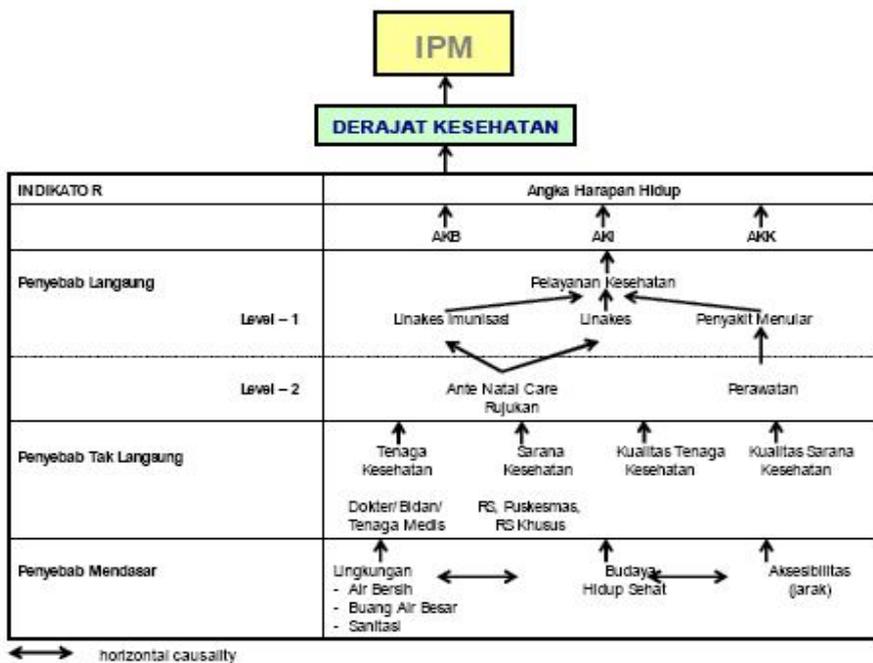
3.3 Peningkatan IPM bidang Kesehatan

Kesehatan penduduk dapat menjadi indikator untuk mengukur lama hidup rata-rata penduduk. Semakin tinggi tingkat kesehatan penduduk, maka semakin tinggi pula angka harapan hidup atau lama hidup rata-rata. Hal ini juga akan berakibat tingginya score indeks kesehatan (IK) dan meningkatkan IPM. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesehatan penduduk, akan mengakibatkan rendahnya angka harapan hidup.

Peningkatan IPM bidang kesehatan (IK) dapat dilaksanakan melalui program baru atau peningkatan berbagai aktifitas yang telah dilakukan. Peningkatan ini dilakukan berdasarkan kepada temuan-temuan dilapangan. Temuan-temuan inilah yang akan mewujudkan akar permasalahan sehingga akan lebih memudahkan penyusunan aktifitas untuk peningkatan indeks

kesehatan (IK) yang akan berakibat pada peningkatan IPM. Gambar/bagan 3.4 dapat dijadikan acuan untuk menyusun evaluasi diri mengenai akar permasalahan kesehatan.

Gambar 3.4 Analisis akar permasalahan kesehatan



Pemerintah kota/kabupaten sebagai pelaksana PPK dapat bersama-sama dengan Perguruan Tinggi setempat menganalisis akar permasalahan kesehatan, diantaranya penyebab mendasar, penyebab tak langsung, juga penyebab langsung yang mengakibatkan rendahnya IK, yang juga berakibat rendahnya IPM. Ketiga penyebab ini akan menghasilkan data angka harapan hidup. Dari sini dapat disusun program-program untuk meningkatkan IK berdasarkan pada peningkatan kualitas kesehatan hidup melalui peningkatan kesehatan lingkungan hidup, budaya hidup sehat, dan tercukupinya fasilitas penunjang peningkatan kesehatan.

3.4 Peningkatan IPM bidang Kemampuan Daya Beli

Kemampuan daya beli masyarakat dalam score IPM diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap negara. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka semakin tinggi pula angka angka pendapatan perkapita. Hal ini juga akan berakibat tingginya score indeks daya beli (IDB) dan meningkatkan IPM. Sebaliknya, rendahnya tingkat daya beli masyarakat, akan mengakibatkan rendahnya angka pendapatan perkapita.

Peningkatan IPM bidang kemampuan daya beli masyarakat (IDB) dapat dilaksanakan melalui program baru atau peningkatan berbagai aktifitas yang telah dilakukan. Peningkatan ini dilakukan berdasarkan kepada temuan-temuan dilapangan. Temuan-temuan inilah yang akan mewujudkan akar permasalahan sehingga akan lebih memudahkan penyusunan aktifitas untuk peningkatan IDB yang akan berakibat pada peningkatan IPM.

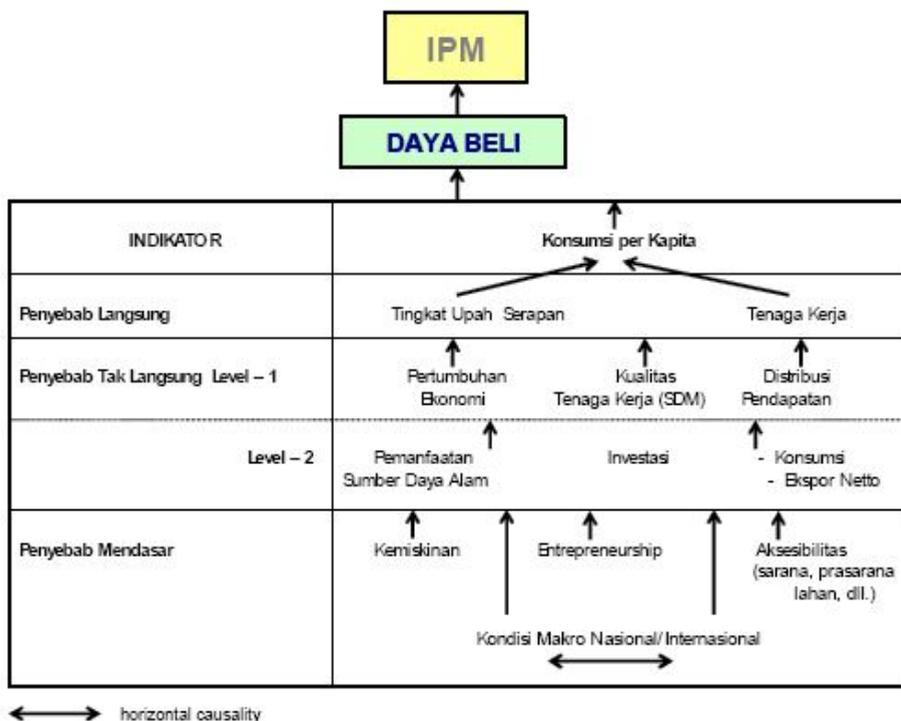
Gambar/bagan 3.5 berikut dapat dijadikan acuan untuk menyusun evaluasi diri mengenai akar permasalahan kemampuan daya beli masyarakat.

Pemerintah kota/kabupaten sebagai pelaksana PPK dapat bersama-sama dengan Perguruan Tinggi setempat menganalisis akar permasalahan kemampuan daya beli masyarakat, diantaranya penyebab mendasar, penyebab tak langsung, juga penyebab langsung yang mengakibatkan rendahnya IDB, yang juga berakibat rendahnya IPM. Ketiga penyebab ini akan menghasilkan data angka penghasilan. Dari sini dapat disusun program-program untuk meningkatkan IDB berdasarkan pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui program-program penyediaan sumber-sumber penghasilan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, peningkatan harga jual produk masyarakat, dan lain-lain.

3.5 Perguruan Tinggi sebagai Nara Sumber Pada Pelaksanaan PPK

Pelaksanaan PPK oleh kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat berisi berbagai ragam aktifitas. Pada pelaksanaannya, Perguruan Tinggi dapat dijadikan sebagai nara sumber pada aktifitas-aktifitas riil seperti penyuluhan-penyuluhan, pelatihan, kursus, konsultasi, manajemen, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan karena Perguruan Tinggi memiliki staf ahli dari berbagai bidang ilmu. Dengan adanya dukungan Perguruan Tinggi pada pelaksanaan PPK, maka akan semakin meningkatkan peluang tercapainya IPM 80 propinsi Jawa Barat pada tahun 2010.

Gambar 3.5 Analisis akar permasalahan kemampuan daya beli masyarakat



Perguruan tinggi bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat dapat merancang program-program yang berkaitan dengan peningkatan IPM. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sebuah forum, seminar, atau media diskusi lainnya. Pemerintah daerah bisa memberikan latar belakang serta data-data terkait mengenai program-program yang akan, sedang, dan yang sudah dilakukan. Informasi tersebut selanjutnya dianalisis bersama.

Perguruan Tinggi, sesuai dengan kapasitasnya sebagai staf ahli, dapat memberikan usulan-usulan program baru yang mungkin dapat dilaksanakan, atau mendukung peningkatan program-program yang sudah ada, dan akan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Contoh riil peranan Perguruan Tinggi pada pelaksanaan PPK adalah, misalnya Universitas Islam Bandung (UNISBA) mengajukan diri atau diundang untuk ikut serta dalam pelaksanaan PPK pemerintah Kabupaten Bandung, dengan aktifitas PPK 2006-2007 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisis akar permasalahan kemampuan daya beli masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SKPD TERKAIT
1	PELAYANAN GEMAS DUKUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye PHBS (Rp. 109.500.000,-) 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyehatan Lingkungan (Rp. 1.246.600.000,-) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan
2	PELAYANAN MURAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Peran dan Fungsi Polindes Mandiri Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Rp. 52.050.000,-) 2. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Polindes Mandiri Menuju Desa Siaga (Rp. 2.048.600.000,-) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan - Dinas Kesehatan, Bakorwil Priangan
3	GERBANG MAS RAHARJA INOVA KREATIF BIDANG DAYA BELI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Pengembangan Produksi Padi Hemat Input dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Bunga Anggrek (Gerakan Parit Samarani) (Rp. 1.448.552.100,-) 2. Pengembangan Rumah Kemasan Mandiri (Packing House) (Rp. 798.135.400,-) 3. Penumbuhan Kawasan Agribisnis Terpadu (Rp. 1.000.000.000,-) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bakorwil Priangan - Dinas Indag, Bakorwil Priangan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bakorwil Priangan - Dinas Peternakan, Dinas Perikanan,

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SKPD TERKAIT
		4. Peningkatan Pendapatan Keluarga Peternak/Pembudidaya Ikan dan Pengolahan Ikan Melalui Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan dan Perikanan (Rp.2.853.312.500,-)	Bakorwil Priangan
4	PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PEDESAAN BERBASIS POTENSI SETEMPAT	1. Gerakan Pengembangan Industri/Kerajinan Pada 7 Komoditas (Gerakan Istri Rajin) (Rp. 1.400.000.000,-)	- Dinas Indag, Bakorwil Priangan
5	CALAKAN	1. Pendidikan Kecakapan Hidup Pedesaan (Rp. 414.454.000,-) 2. Pengembangan Pendidikan Masyarakat (Rp. 745.832.500,-) 3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional Bermuatan Lingkungan Sehat (Rp.2.305.692.500,-) 4. Pendidikan Kesetaraan Bermuatan Kewirausahaan (Rp. 1.877.521.000,-)	- Dinas Pendidikan, Bakorwil Priangan - Dinas Pendidikan, Bakorwil Priangan - Dinas Pendidikan, Bakorwil Priangan - Dinas Pendidikan, Bakorwil Priangan
6	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR/ STAKEHOLDER	1. Peningkatan SIM PPK dan Perhitungan IPM Perdesa (Rp. 631.605.000,-)	- Bapesitelda, Bapeda Bidang Monev, Bakorwil Priangan

Berdasarkan tabel diatas, maka tidaklah mungkin pemerintah kabupaten bandung, sendirian, melaksanakan program-program tersebut.

Pada pelaksanaannya, sangatlah dibutuhkan bantuan pihak luar, diantaranya adalah Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi dapat berperan sebagai nara sumber, staf ahli, atau lembaga konsultasi. Perguruan Tinggi dapat juga berperan sebagai lembaga monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaan program tercapai dengan optimal.

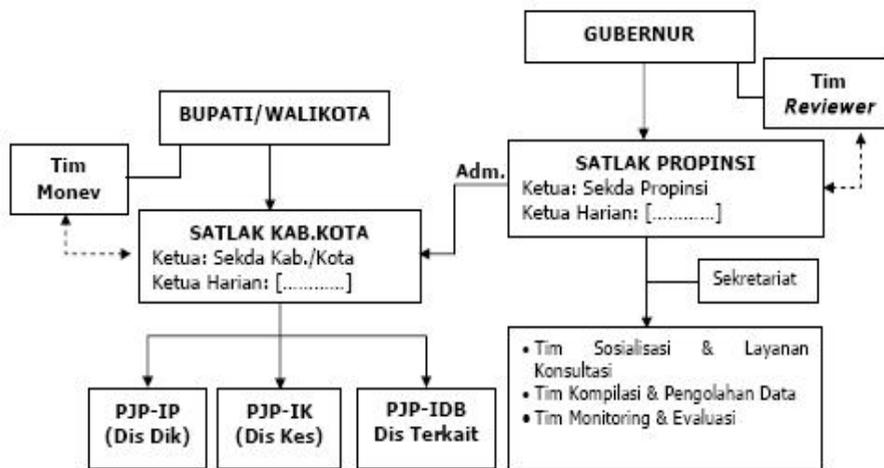
Program akselerasi IPM kabupaten bandung pada tabel diatas, merupakan wujud nyata realisasi program akselerasi IPM 2006-2007 yang didanai oleh pemerintah propinsi Jawa Barat dalam program pendanaan berbasis kompetisi (PPK). Program ini akan terus bergulir sesuai dengan target IPM 80 propinsi Jawa Barat hingga tahun 2010. Bukan tidak mungkin, program ini akan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, sehingga, jika tidak dimulai dari sekarang, Perguruan Tinggi (dalam hal ini, diantaranya adalah UNISBA) tidak akan pernah bisa berperan dalam program-program pemerintahan, dan dikhawatirkan Perguruan Tinggi akan kehilangan peranannya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai staf ahli pendidik, peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

3.6 Monitoring dan Evaluasi PPK

Struktur organisasi pelaksana PPK dan tim monitoring dan evaluasi (monev) adalah di halaman berikut :

Mengacu kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah propinsi Jawa Barat, bahwa tim monitoring dan evaluasi (monev) internal atas kinerja yang telah dan sedang dilakukan adalah terdiri dari personil-personil PNS yang bertugas di pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, seluruh pelaksana PPK dan juga pelaksana monev adalah orang-orang yang beraktivitas dalam “satu atap”. Kondisi ini sangat rentan terhadap praktek KKN yang saat ini sedang-gencar-gencarnya dihapuskan di bumi indonesia. Akan lebih baik apabila dilibatkan pihak luar yang independen, misalnya para ahli di Perguruan Tinggi, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Gambar 3.7 Struktur Organisasi Pelaksana PPK



Walaupun pemerintah juga menyediakan struktur eksternal auditor, yang dimungkinkan terlibatnya pihak luar/independen, tetapi struktur ini hanya bekerja berdasarkan temuan-temuan di akhir program. Bisa saja dilakukan manipulasi data, manipulasi fisik, atau manipulasi apapun itu, pada saat pelaksanaan PPK berlangsung, sehingga data-data akhir pelaksanaan program akan terlihat berhasil, relevan dan wajar, walaupun sebenarnya jauh sekali dengan kenyataan. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak penyedia dana, dalam hal ini pemerintah propinsi Jawa Barat, terutama karena sangat besarnya dana yang dialokasikan. Dengan adanya penyimpangan, maka akan mengecilkan kemungkinan tercapainya target yang diharapkan.

Perguruan Tinggi merupakan salah satu sumber terbaik untuk memilih personil independen, memiliki kompetensi dan keahlian yang tinggi, teruji, jujur dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai tim monitoring dan evaluasi PPK internal dan eksternal, disamping personil-personil yang sudah ditetapkan pemerintah propinsi. Hal ini akan lebih menjamin transparansi dan alokasi dana yang optimal, sehingga peluang tercapainya target IPM 80 pada tahun 2010 akan lebih besar dan lebih mungkin tercapai.

4 Penutup

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendanaan Kompetisi (PPK) akselerasi peningkatan IPM propinsi Jawa barat 2001-2010 yang diluncurkan pemerintah Propinsi Jawa Barat merupakan bukti komitmen pemerintah dan langkah nyata dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM dengan menyediakan anggaran sebesar 380 milyar rupiah untuk beberapa daerah di Jawa Barat untuk periode 2006-2007. Pelaksanaan program PPK ini memerlukan keseriusan, keahlian dan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu peranan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mensukseskan target IPM 80 Propinsi Jawa Barat tahun 2010.
- b. Diperlukan kerja keras dan pemikirn serta usaha maksimal untuk mencapai target IPM 80 pada tahun 2010. Oleh karena itu, peranan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program peningkatan IPM diberbagai daerah di Propinsi Jawa Barat seiring program pendanaan kompetisi (PPK) yang digulirkan pemerintah propinsi. Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai nara sumber, staf ahli, lembaga konsultasi, dan peran lainnya yang memungkinkan. Bahkan Perguruan Tinggi dapat juga berperan sebagai media monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan PPK dapat berjalan optimal dan efisien, serta terhindar dari praktek-praktek KKN serta penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan negara.
- c. Peningkatan IPM baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kemampuan daya beli masyarakat, dapat dilakukan melalui analisis akar permasalahannya. Pada pelaksanaannya, perguruan tinggi memiliki berbagai staf ahli dan nara sumber untuk memecahkan permasalahan yang ada. Keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaksanaan PPK, merupakan salah satu kunci keberhasilan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat jawa barat melalui pencapaian target IPM 80 tahun 2010
- d. Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) PPK sebaiknya tidak hanya terdiri dari PNS atau personil-personil pemerintah kota/kabupaten saja. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya praktek KKN atau bentuk penyimpangan lainnya, yang saat ini sedang gencar-gencarnya

dihapuskan, terutama karena melibatkan alokasi dana yang cukup besar. Peran Perguruan Tinggi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya praktek KKN, dan meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program demi tercapainya akselerasi peningkatan IPM menuju IPM 80 pada tahun 2010.

4.2 Saran

Sesuai dengan rencana strategis pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan akselerasi peningkatan IPM sebesar 80 pada tahun 2010, maka dimungkinkan program pendanaan kegiatan berbasis kompetisi sejenis PPK, akan terus bergulir. Hal ini tentunya pemerintah propinsi akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak demi tercapainya target IPM tersebut. Bahkan, bukan tidak mungkin, pada gilirannya, perguruan tinggi, khususnya UNISBA, akan diminta sumbangsih dan peranannya untuk ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Propinsi Jawa Barat, khususnya masyarakat kota Bandung, sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan kesiapan ilmu dan keterampilan, dan kematangan pola pikir, agar, civitas akademika, para dosen, para ahli di lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya UNISBA, siap untuk ikut serta mengabdikan, membangun dan berkarya, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Propinsi Jawa Barat, khususnya masyarakat kota dan kabupaten Bandung.

Semoga tulisan ini dapat lebih membuka cakrawala kita mengenai apa yang seharusnya kita lakukan untuk masyarakat, terutama keterlibatan langsung dengan para pelaksana pemerintahan daerah/kota demi keberlangsungan eksistensi UNISBA dimasa depan. Bismillah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Dadang S., *Raksa Desa, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, Dokumentasi LLPM UNISBA, 2006.
- Gsianturi., *Soal Indeks Pembangunan manusia : Pemerintah tak bisa terima Penilaian UNDP*, <http://www.suarapembaruan.com>, Juli 2004.

- Gsianturi, Laporan UNDP 2004 : *Indeks Pembangunan manusia di Indonesia tetap buruk*, <http://www.suarapembaruan.com>, Juli 2004.
- Human Development Report 2005, *International Cooperation at Crossroads Aid, Trade, and Security in an Unequal World*, United Nations Development Programme, 1 UN Plaza, New York, New York, USA, 2005.
- Indonesia Human Development Report 2004, *The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia*, BPS Statistics Indonesia, BAPPENAS, UNDP, Juni 2004
- Indeks Pembangunan Manusia, Wikipedia, <http://www.wikipedia.org> , 2006.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Propinsi Riau, <http://www.riau.go.id>, 2006.
- Millah, Saeful., *Kajian Untuk Para Perencana Pembangunan Daerah : Potret Pencapaian IPM Jawa Barat*, Dokumentasi LLPM UNISBA, 2006.
- Nugroho SBM, *Kelemahan Indeks Pembangunan Manusia*, Dokumentasi IPM LLPM UNISBA, 2006.
- Panduan Penyusunan Proposal Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat 2006, Pemerintah Propinsi Jawa barat, <http://www.jabar.go.id>, 2005
- Program Kegiatan IPM Daerah Pemenang PPK 2006, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, <http://www.jabar.go.id>, 2005
- Pemerintah Propinsi Jawa Barat, <http://www.jabar.go.id> , 2006
- Sulendrakusuma, Robby Sakti., *Menyoal Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat*, Dokumentasi LLPM UNISBA, 2006.
- UNDP, *Laporan Pembangunan Manusia memberi peringkat pada daerah-daerah di Indonesia*, <http://www.undp.or.id/ihdr2001/inforinkas3.asp>., Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia, 2001.
- UNDP, *Partnership to Fight Poverty*, <http://www.undp.or.id/general/index.asp>, 2006.
- Wahono, Francis, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2004 siapa takut?*, <http://www.kompas.com>, Nopember 2004